

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Minuta akta merupakan atau termasuk dokumen negara, dan termasuk dokumen yang dirahasiakan. Notaris tidak diperkenankan untuk mengeluarkan akta tersebut dari kantor notariat. Namun jika diperlukan untuk keperluan proses hukum, penyidik boleh melihat dan fotokopi ditempat notaris. Sebagai dokumen negara, minuta akta termasuk sebagai arsip negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Sedangkan kutipan minuta akta diserahkan kepada para penghadap sebagai bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum di hadapan notaris.
- b. Penerapan Pasal 216 KUHP terhadap notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 dan 266 KUHP terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP meminta untuk diserahkan minuta akta (asli) untuk keperluan penyidikan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN, yang diserahkan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan adalah kutipan minuta akta dan penyidik harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah hanya akan memberikan kutipan minuta akta, namun penyidik meminta minuta akta asli dan Majelis Pengawas Daerah menyerahkan minuta akta asli tersebut.